

## ABSTRAKSI

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dari dalam negeri. Dengan adanya pajak, penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan dapat berjalan lancar. Terdapat dua jenis pajak yakni pajak pusat dan pajak daerah. Dengan dilaksanakannya sistem desentralisasi dan otonomi daerah, pada saat ini jenis pajak daerah semakin ditingkatkan dan diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan daerah yang kemudian berimbas pada kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana faktor-faktor pendukung pelaksanaan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB berupa kemampuan SDM, ketersediaan fasilitas dan informasi, serta kewenangan yang dimiliki pelaksana, yakni Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, serta teori tentang faktor-faktor pendukung pelaksanaan desentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah para staf Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Untuk teknik penentuan informan seluruhnya menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi. Kemudian menganalisis data menggunakan reduksi data dan penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan SDM pelaksana, ketersediaan informasi dan fasilitas, serta kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah cukup mendukung pelaksanaan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB.

Kata kunci : PBB-P2, BPHTB, pengalihan pajak daerah, desentralisasi

## ABSTRACT

*Taxation is one of the largest revenue source in the country. With the tax, governance and development process can run effectively. There are two types of taxes that is central taxes and local taxes. With the implementation of decentralization and regional autonomy, at this type of local tax and is expected to be further enhanced to increase local revenues which then impact on the welfare of society.*

*The purpose of this study is to describe how these factors supporting the implementation of the transfer of the PBB-P2 and BPHTB form of human resources capabilities, availability of facilities and information, as well as the competencies of the executor, namely Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan in Surabaya.*

*This study uses the theory of public policy, public policy implementation, as well as theories about the factors supporting the implementation of decentralization. This study uses qualitative methods, the type of descriptive research. These research sites are Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan in Surabaya. Informants are taken in this study were the staff of the Office of Revenue and Financial Management in Surabaya. For all informants determination technique using purposive sampling. The data was collected by means of observation, in-depth interviews and documentation. Then analyzed the data using data reduction and presentation of data, then drawing a conclusion or verification. The results of this study indicate that the ability of managing human resources, the availability of information and facilities, as well as the authority possessed by the Department of Revenue and Financial Management in Surabaya have been sufficient to support the implementation of the transfer of the pbb-P2 and BPHTB.*

*Keywords: PBB-P2, BPHTB, the transfer of local tax, decentralization*